

ABSTRAK

Anak sebagai manusia yang belum dewasa dalam melakukan tindak pidana kerap kali hanya memenuhi unsur *actus reus*, dan tidak memiliki *mens rea*. Perbuatan anak masih sangat mudah dipengaruhi sekitar, sehingga adanya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Atas tanggung jawab tersebut, orang tua dapat dimintia pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban ini dapat terjadi jika adanya 3 poin, yaitu kesalahan lebih besar orang tua, adanya pengetahuan spesifik, dan kesalahan orang tua. Pada penelitian hukum ini menggunakan data kualitatif sekunder yang mana dapat berasal dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Penelitian hukum ini pun tidak terbatas pada disiplin ilmu hukum, namun tetap mengelaborasikannya dengan pemahaman dan ilmu lain yang relevan terhadap kajian yang digunakan. Dalam konteks *ius constituendum*, maka *vicarious liability* dapat terjadi karena terdapat dalam Pasal 37 huruf b RKUHP dan kemudian diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Konsepnya dapat mengikuti kualifikasi diversifikasi dengan tambahan 3 poin dalam pertanggung jawaban orang tua.

Kata kunci: *vicarious liability*; perlindungan anak; pertanggung jawaban pidana

ABSTRACT

Children as human beings who are immature in committing crimes often only fulfill the actus reus element, and do not have mens rea. Children's actions are still very easily influenced by their surroundings, so there is a responsibility of parents towards their children. For this responsibility, parents can be held accountable. This responsibility can occur if there are 3 points, namely the parent's greater fault, the existence of specific knowledge, and the parent's error. This legal research uses secondary qualitative data which can come from primary legal sources or secondary legal sources. This legal research is not limited to legal disciplines, but still elaborates it with understanding and other knowledge that is relevant to the study used. In the context of the ius constituendum, vicarious liability can occur because it is contained in Article 37 letter b of the RKUHP and then further regulation is needed in the Child Protection Act. The concept can follow the diversion qualification with an additional 3 points in parental responsibility.

Keywords: *vicarious liability*; child protection; criminal responsibility